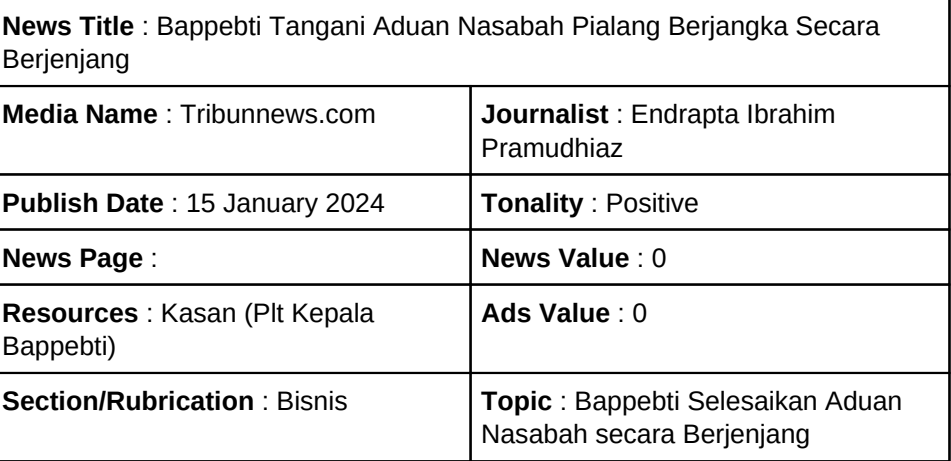




Bappebti Tangani Aduan Nasabah Pialang Berjangka Secara Berjenjang

Selva, 19 Januari 2024 @ 08:45 WIB
Revisi: Dikoreksi, Revisi: Pemutakhiran
Editor: Decha Ardi



Ombudsman Republik Indonesia

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endranga Pramudihastha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berjanji meminda-jaluri aduan nasabah korban penyalahgunaan pialang berjangka komoditi seperti hasil temuan Ombudsman RI.

Pi Kepala Bappebti Kasan bilang, Bappebti tidak diam demi melindungi nasabah. Dia mengatakan, aduan nasabah yang masuk diadangi dan diselesaikan secara berjenjang.

Seluruh proses pemeriksaan, gilir kasus, dan penanganan *sanksi* telah dilakukan sesuai prosedur dalam perserutan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).

"Sanksi administratif yang dikenakan Bappebti merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tin Bappebti pada penanganan pengaduan atau pelanggaran ketentuan yang dilanggar administratif," kata Kasan dikutip dari keterangan tertulis, Senin (18/1/2024).

Terkat permintaan pengambilan dana atau ganti rugi kepada Bappebti, disediakan jalur penyelesaian melalui pengadilan negeri atau proses arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAATI) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Token Milik Anak Didit Dilarang

Hai ini sesuai pilihan penyelesaian permasalahan hukum yang ditentukan dalam dokumen perjanjian pembelian amanat nasabah.

Lebih lanjut, Bappebti mengoptimalkan pengawasan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam strategi pengawasan tersebut, Bappebti melakukan beberapa langkah antara lain melalui peningkatan regulasi dan literasi, integrasi sistem aplikasi, dan penguatan sistem rating pialang berjangka.

Rasa Jaga: Bappebti Kebebasan Tuglidan Ombudsman RI, Lamban Tangan Aduan Masyarakat

"Berikutnya, penyelesaian penanganan pengaduan dan penguatan kerja sama seperti dengan Kejaksaan Agung RI," ujar Kasan.

Dikuti dari ombudsman-dgk, sejumlah korban *pialang berjangka* melakukan audiensi di Ombudsman RI.

Mereka menuntut Bappebti untuk memberikan *sanksi* tegas kepada perusahaan pialang berjangka yang merugikan pelakor berupa kompensasi ganti rugi.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Firmansyah menyampaikan, dari keterangan para palapor dan pemeriksaaan Ombudsman, pihak-pihak menemukan setidaknya tiga dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Bappebti.

Rasa Jaga: Ombudsman Minta Bappebti Jatuhkan Kambak Tegus ke Pialang Curang

"Setidaknya ditamukan pengabaian kewajiban hukum karena tidak ada pendataan terhadap perusahaan pialang bermasalah dan hanya memberikan sanksi administratif," kata Yeka.

"Selanjutnya, tidak kompeten serta penundaan berfand dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sehingga di bidang perdagangan berjangka komoditi," sambungnya.

Menurut Yeka juga dugaan maladministrasi ini tangguh diujui dalam proses pemeriksaan oleh Ombudsman.

Dicermakan pada akhir Januari 2024, pihaknya akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bappebti yang berisi temuan serta tindakan korektif yang wajib dilaksanakan.

Saat ini, lanjut Yeka, pihaknya sudah mengirim 15 laporan masyarakat terkait perdagangan berjangka komoditi dengan total kerugian mencapai Rp 8 miliar.

Rasa Jaga: Pemerintah Blokir 68 Pialang Berjangka Akibat Tak Berizin, Berikut Daftaranya

"Harapannya dengan diterbitkan 15 LHP ini ada tindakan tegas dari Bappebti. Kami menuntut ada pengidari sehingga bisa masuk ke piliora para perusahaan pialang berjangka ini. Dengan adanya kecurangan itu mungkin itu sudah jelas," ujar Yeka.

Nya menyimpulkan sikap Bappebti yang tidak memberikan *sanksi* tegas kepada perusahaan pialang berjangka komiditi yang merugikan pelakor.

Dia bilang, sementara Bappebti yang juga merupakan pengawas dapat memberikan perlindungan tegus kepada masyarakat yang menggunakan perdagangan berjangka komoditi.

Bappebti juga dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan preventif, mengingat banyaknya nama perusahaan Pialang Berjangka yang beberapa kali dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman RI.